

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES KERTORAHARJO)  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA  
SANANKERTO KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik (S. AP)**



**OLEH :**

**RICHARDUS MAPITARA WODON**

**2015210159**

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI MALANG**

**2022**

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES KERTORAHARJO)  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT DESA  
SANANKERTO KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG**

**Oleh: Richardus Mapitara Wodon (2015210159)**

**RINGKASAN**

Sampai saat ini, organisasi kota di Indonesia telah diperintahkan oleh pedoman untuk memilah contoh pemerintah untuk mendapatkan kota sesuai dengan aturan kemerdekaan. Kota diberi kesempatan untuk mengelola domain mereka sesuai potensi dan masalah yang terjadi di sekitarnya. Pemerintah kota dianggap sebagai unit pemerintahan yang paling rendah yang memiliki bagian dari domain negara. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat 1 dimaknai bahwa kota adalah satu kesatuan wilayah yang mempunyai batas wilayah yang mengatur segala urusan pemerintahan, dan kepentingan daerah sekitarnya dalam rangka penggerak wilayah setempat, atau kebebasan konvensional mulai dirasakan dan dalam kerangka pemerintahan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pedoman ini adalah kesempatan bagi pemerintah kota untuk menyelidiki semua jenis kota serta semacam perspektif untuk bantuan pemerintah kota kepada para eksekutif yang mendorong dewan daerah (Huda, 2015:35). Dari pendalaman ini untuk menentukan tugas BUMDes Kertoraharjo dalam meningkatkan gaji individu dan untuk menentukan variabel-variabel yang mendukung dan menghambat kerja BUMDes Kertoraharjo dalam meningkatkan gaji individu Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Eksplorasi selesai pada November 2020 – Februari 2021 di Badan Usaha Milik Desa Kertoraharjo dan di Kantor Desa Sanankerto, Kecamatan Turen. Ilmuwan menggunakan jenis eksplorasi grafis, khususnya dengan menggambarkan pekerjaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan gaji kelompok masyarakat Desa Sanankerto. Dengan penekanan pada tugas BUMDes Kertoraharjo dalam memperluas gaji Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang. Analisis juga menggunakan sumber informasi, khususnya informasi penting dan informasi tambahan. Strategi pemilahan informasi yang digunakan oleh para ahli adalah persepsi, wawancara, dokumentasi, subjek penelitian. Prosedur penyelidikan informasi yang digunakan adalah pengumpulan informasi, pengurangan informasi, penyajian informasi, dan penarikan akhir.

**Kata kunci: Peran, Pendapatan Masyarakat, BUMDes**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sampai saat ini, pemerintah kota di Indonesia telah diperintahkan oleh peraturan untuk mengkoordinasikan desain pemerintah kota dalam rangka kemerdekaan. Kota diberi kesempatan untuk mengontrol domain mereka sesuai potensi dan masalah yang terjadi di dekatnya. Pemerintah kota dianggap sebagai unit pemerintahan yang paling rendah yang memiliki bagian dari domain negara. Kota adalah unit wilayah lokal yang sah yang memiliki batas-batas regional yang disetujui untuk mengarahkan semua urusan administrasi, dan kepentingan wilayah lokal terdekat dalam kaitannya dengan dorongan wilayah lokal, hak-hak awal, atau kebebasan konvensional yang dirasakan dan dianggap di publik. pengaturan kewenangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan tersebut merupakan peluang bagi pemerintah kota untuk menggali segala jenis potensi kota sekaligus sebagai sumber perspektif perubahan penyelenggaraan pemerintahan kota yang mengarah pada bantuan pemerintah daerah

BUMDes adalah suatu badan usaha yang modalnya umumnya dimiliki oleh kota yang langsung berasal dari kekayaan kota dan terisolasi untuk mengawasi sumber daya, administrasi dan administrasi bisnis lainnya untuk bantuan pemerintah daerah kota. BUMDes merupakan komponen dan instrumen untuk menjadi penggerak keuangan jaringan negara. BUMDes adalah titik pusat

perekonomian daerah kota untuk mendorong perekonomian di sekitarnya. Selain itu, kehadiran BUMDes juga untuk memperkuat perekonomian warga kota.

Upaya untuk bekerja pada bantuan pemerintah daerah setempat harus dimungkinkan dengan cara yang berbeda. Upaya tersebut dapat berupa program penguatan daerah, pengerjaan sifat administrasi publik, penguatan ekonomi melalui yayasan keuangan kota, dll. Dalam menilai tingkat bantuan pemerintah daerah kota, ada beberapa petunjuk yang berlaku sebagai aturan. , antara lain dengan memeriksa di batas keuangan daerah setempat.

Batas moneter jaringan pedesaan tidak dapat dibedakan dari tingkat pembayaran yang mereka dapatkan. Perubahan gaji adalah salah satu mur dan baut dalam tingkat bantuan pemerintah. Keadaan keuangan daerah bukan hanya masalah kekhawatiran dari pemerintah lingkungan atau pemerintah pusat, tetapi pada saat yang sama merupakan tanggung jawab utama dari pemerintah kota yang tiba-tiba menjadi tamu pekerja masyarakat.

BUMDes adalah perkumpulan yang ikut serta dalam bidang usaha di bidang moneter dan administrasi publik yang dibina secara kekeluargaan dan kerjasama bersama sehingga terletak pada bantuan pemerintah daerah kota. Dalam pedoman tersebut juga tidak ada pasal yang menggarisbawahi upaya peningkatan gaji daerah kota, namun dengan arahan kontribusi daerah dalam yayasan dan pengurus BUMDes, hal itu mempengaruhi keadaan keuangan yang diinginkan oleh daerah kota.

Ada beberapa BUMDes di Indonesia yang berada di bawah administrasi, mengingat pekerjaan untuk meningkatkan gaji daerah kota. Dari sisi jumlah, jumlah BUMDes yang dimulai sekitar tahun 2015 terus meningkat.

BUMDes merupakan perbaikan bagi kota untuk memperkuat batas moneter kota melalui pendirian BUMDes. Berdasarkan jumlah banjir di Bumdes terkait tahun 2015, maka secara umum menunjukkan pola yang terus berkembang secara konsisten. Selain telah diatur dalam pedoman tersebut, peningkatan jumlah bumdes juga dipengaruhi oleh pengeluaran Dana Desa yang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk memasukkan sumber daya ke dalam yayasan bumdes.

Di Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, didirikan Badan Usaha Milik Desa bernama Bumdes Kertoraharjo. Organisasi ini didirikan atas kemungkinan lingkungan sekitar untuk mengembangkan kemampuan kota sehingga menjadi unit khusus yang bernilai uang. Siklus pondasi tergantung pada pertimbangan kota termasuk semua komponen kota. Dari kemungkinan yang ada saat ini, unit-unit khusus yang diselesaikan terdiri dari Ekowisata Boonpring, Agen 46 dan Pipanisasi (Air Bersih). Selain itu, untuk memenuhi syarat pendirian Bumdes, Pemkot Sanankerto menggunakan modal spekulasi sebesar Rp60.000.000 dari aset pemkot untuk tahun anggaran 2016.

Permasalahan yang dialami oleh BUMDes Kertoraharjo adalah bahwa dari beberapa jenis usaha yang ada di BUMDes Kertoraharjo, yang memiliki keuntungan terbesar atau yang paling berpengaruh terhadap siklus pendapatan adalah ekowisata boonpring. Dengan demikian, peran BUMDes sangat dibutuhkan

untuk dapat mengelola jenis-jenis usaha yang ada. Bumdes Kertoraharjo juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya, yang bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Kunjungan wisatawan ke unit wisata merupakan peluang untuk mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ekowisata Boonpring memiliki cakupan wilayah yang cukup luas sehingga membutuhkan banyak aparat pelaksana, masyarakat yang bekerja di dalamnya akan mendapatkan imbalan berupa upah/gaji yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

BUMDes Kertoraharjo aktif mulai berjalan pada tahun 2017, meskipun sudah berdiri satu tahun sebelumnya. Pada tahun 2017, perolehan pendapatan BUMDes Kertoraharjo sebesar Rp. 402.905.900. Sementara itu, pada tahun 2018, total pendapatan Bumdes Kertoraharjo mencapai Rp. 1.098.330.900.

BUMDes tergantung dari total pendapatan BUMDes. Semakin besar pendapatan BUMDes setiap tahunnya maka pendapatan pegawai juga akan meningkat sesuai prosentase yang terdapat dalam peraturan desa. Jika mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka persentase tambahan dana pegawai harus ditingkatkan mengingat beban kerja operasional yang mereka lakukan harus sama dengan pendapatan yang mereka terima.

BUMDes ini berupaya memberdayakan masyarakatnya, mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja dan melakukan berbagai pembangunan dengan memanfaatkan hasil pengelolaan BUMDes itu sendiri. Keberadaan BUMDes bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan melalui peningkatan

pendapatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang ditetapkan adalah “Peranan BUMDes Kertoraharjo Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan landasan di atas, perincian rangkaian masalah adalah sebagai berikut.

1. Apa Tugas BUMDes Kertoraharjo Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Peran BUMDes Kertoraharjo dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Motivasi di balik pemeriksaan ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tugas BUMDes Kertoraharjo dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang
2. Menentukan Faktor Pendukung dan Penghambat Peran BUMDes Kertoraharjo Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang.

## **1.4 Manfaat pemeriksaan**

Dalam tinjauan ini ada dua keuntungan yang diperoleh, baik keuntungan hipotesis dan keuntungan yang wajar, untuk lebih spesifiknya:

1. Secara hipotetis, hasil yang diangkat dalam penelitian ini akan menjadi ide yang diterapkan untuk mengeksplorasi kaitannya dengan tugas BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Manfaat dari pemeriksaan ini juga untuk menambah informasi, khususnya pembicaraan tentang strategi kemajuan dan organisasi pemerintahan kota. Selain itu, cenderung digunakan sebagai bantuan untuk pertemuan-pertemuan tertentu yang tertarik dengan ujian ini.

2. Pada dasarnya

1. Manfaat bagi Pemerintah Desa

Upaya dilakukan untuk memiliki opsi untuk berkontribusi dan memindahkan administrasi yang dikelola negara bagian dalam mengawasi BUMdes untuk meningkatkan gaji daerah.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Sebagai semacam perspektif atau acuan bagi para skolastik yang akan mengarahkan penelitian terkait dengan pelaksanaan strategi para eksekutif BUMDes.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori, dan Implikasinya di Era Reformasi*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press: Malang
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Putra, Anom Surya. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
- Rahardja, Prathama dan Mandala Manurung. 2011. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Rahardjo Adisasmita, 2013. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sarwono. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharyanto. 2014. *Pelembagaan BUMDesa*. Yogyakarta: Seri Buku Pintar BUMDesa
- Sumpeno, Wahjudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read
- Sutoro Eko, 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Cetakan Pertama FPPD
- Sodikin dan Riyono. 2014. *Akuntansi Pengantar I*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar***. Jakarta: Rajawali Pers
- Sondang P Siagian, 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Thoha, Miftah. 2012. Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta.: PT. Raja Grafindo Persada
- Milles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI- Press.
- Wahjudin. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-1, Hal: 266-267
- Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yuliani, Maryam. 2011. Keterkaitan Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Distribusi*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

## **Undang-Undang dan Peraturan**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Desa (Perdes) Sanankerto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDES

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Permendesa No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa

## **Jurnal**

Agungunanto, 2016. "*Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*". Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Volume 3 Nomor 1, hal 47

Dina Kurniawati, "*Meningkatkan Peran BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat Desa Di Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng*", Jurnal Abdiraja, Vol. 2, Nomor 2, September 2019, Hlm. 27

- Dewi Kusuma Sri Amelia. 2014. Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Jurnal of Rural And Development*. Vol.04, No.01
- Hartini, (2019) *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Batetangnga Kab.Polman (Tinjauan Ekonomi Islam)*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Herlina, “*Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kehidupan Ekonomi Masyarakat Ditinjau Menurut Ekonomi Islam Studi Di Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir*, (Skripsi, FEBI UIN Riau, 2012), hlm. 53
- Jaya, A.H.M. 2011. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. ISSN: 2337
- Mustafa, Cahyo Sasmito. 2017. *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. ISSN. 2442-6962. Diakses pada tanggal 24 September 2021
- Purnomo, 2014. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. (Lombok Timur: Makalah BPMPD), hlm. 17
- Wicaksono, Yoni Pramilu. Surya, Imam Dan Iskandar, Eddy. 2017. *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser*. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 5 No. 4.